

SKRIPSI

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN  
INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH SKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Disusun Oleh :

Destia Kusumaningtyas

( 124213349 )

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ( STIE ) WIDYA WIWAHA**

**Jl.Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Destia Kusumaningtyas

Tempat Tanggal Lahir : 26 Maret 1993

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Bila terbukti tidak demikian, saya bersedia menerima segala akibatnya, termasuk segala sanksi yang telah ditentukan

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Destia Kusumaningtyas

NIM. 124213349

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## MOTTO

“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran”

(W.B. Yeats )

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”

( Mario Teguh)

“Bahagiakan orang – orang yang menyayangimu, bukan hanya dengan harta tetapi dengan prestasi yang membanggakan“

( Destia Kusumaningtyas )

STIE Widya Niwaha  
Jangan Plagiat

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Gunungkidul, *Good governance* diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik, *Good governance* dilaksanakan agar kinerja pemerintahan daerah lebih terarah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang memadai guna mencapai hasil yang lebih baik dan terciptanya struktur pemerintahan yang ideal yang berorientasi pada tujuan pembangunan nasional, sedangkan Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya atau aset.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada para responden, Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda dengan sebelumnya telah dilakukan Uji Asumsi Klasik.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Gunungkidul.

Kata kunci : Good Governance, Pengendalian Intern, Kinerja Pemerintah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi ( SE ).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, dan masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyusunannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi kemampuan penulis diwaktu yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis.
2. Moh. Mahsun, SE, M.Si.,Ak.,CA.,CPA selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA selaku wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Drs. Mudasetia Hamid, MM.,Ak., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff administrasi dan staff perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

7. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai Bapak dan Ibu tercinta ( Bapak Wasimin dan Ibu Taryati) yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, senantiasa memberikan dukungan, dan doa dalam bentuk apapun.
8. Kakak saya ( Ekawati Rahayu Putri, S.Pd ) yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan dalam bentuk apapun dan saran serta arahan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh pegawai di SKPD Kabupaten Gunungkidul terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berguna untuk penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya Rini, Tety, Emalia, Lina, yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan dan semangat dalam berbagai kondisi.
11. Seluruh teman seperjuangan di kampus tercinta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan juga membalas kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan.

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Destia Kusumaningtyas

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Batasan Masalah .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
1. Good Governance.....	11
1.1 Governance.....	11
1.2 Good Governance .....	12
1.3 Prinsip Good Governance.....	16
2. Pengendalian Intern.....	21
2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern .....	24
2.2 Unsur - unsur Sistem Pengendalian Intern .....	25
2.3 Prinsip - prinsip Sistem Pengendalian Intern .....	26
2.4 Komponen – komponen Pengendalian Intern .....	27
3. Kinerja.....	29
3.1 Pengertian Kinerja .....	29
3.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja .....	31
3.3 Unsur – unsur penilaian Kinerja .....	32
4. Penelitian Terdahulu.....	34
5. Model Penelitan .....	35
6. Hipotesis Penelitan .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
1. Bentuk Penelitian .....	36
2. Lokasi Penelitian .....	36
3. Populasi dan Sampel .....	36
4. Jenis Data dan Sumber Data .....	36
5. Teknik Pengumpulan Data .....	36
6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	37
a. Good Governance .....	37
b. Pengendalian Intern .....	38
c. Kinerja Pemerintah .....	38
7. Instrumen Penelitian .....	39
8. Teknik Analisis Data .....	39
9. Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik .....	39
10. Analisis Regresi Berganda .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul .....	41
B. Pengembalian Kuesioner .....	42
C. Analisis Data .....	43
1. Statistik Deskriptif .....	43
2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	45
D. Hasil Pengujian Kualitas Data .....	48
a. Validitas dan Reabilitas .....	48
E. Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	49
a. Uji Normalitas .....	49
b. Uji Multikolinieritas .....	50
b. Uji Heterokedastisitas .....	51
F. Uji Hipotesis .....	51
1. Uji Regresi Berganda .....	51
2. Uji F .....	53
3. Uji t .....	53
F. Pembahasan Penelitian .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Keterbatasan .....	59

C. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .....	43
Tabel 4.2 Usia Responden .....	44
Tabel 4.3 Pendidikan Responden .....	44
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	45
Tabel 4.5 Uji Normalitas .....	49
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas .....	50
Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas .....	51
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Regresi Berganda .....	52
Tabel 4.9 Tabel Pengaruh variabel $X_1$ dan $X_2$ terhadap $Y$ .....	54

**STIE Widya Widwaha**  
**Jangan Plagiat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Munculnya akuntansi sektor publik di Indonesia di latar belakang dengan adanya Era Reformasi pada tahun 1998, dengan adanya Era Reformasi mendorong masyarakat untuk lebih mengetahui tentang akuntansi sektor publik di Indonesia. Dengan adanya era reformasi merubah pandangan masyarakat mengenai akuntansi sektor public. Masyarakat menginginkan akuntansi sektor publik yang bersih (*good governance*), serta penegakan akuntabilitas sektor publik, masyarakat menuntut kejujuran profesi akuntansi berupa independensi dan kompetensi, dan masyarakat juga menuntut adanya kesejahteraan dengan adanya pembangunan.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsi-prinsip *Good Governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan *Good Governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik *Good Governance* didalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta

nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaedah *Good Governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Bastian (2001:329) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi

Perkembangan akuntansi sektor publik semakin berkembang pesat dengan lahirnya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa. Perkembangan otonomi daerah yang pesat telah menjadikan perubahan dari pemerintah yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dengan daerah, dan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya secara langsung dan bertanggung jawab. Keberhasilan otonomi daerah di tentukan dari kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang ada.

Dalam otonomi daerah seluruh pengelolaan keuangan berada di tangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa atau disering disebut dengan *good governance*. Menurut Arie Soelendro (2000:13) , dalam Arja Sadjiarto (2000) unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparancy*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi diberbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan *Good Governance* ini dituntut untuk memberikan pertnggungjawaban yang trasparan dan lebih akurat.

Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap Negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan payung hukum Pemerintah Daerah yang antara lain adalah mengenai pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara.

Di lingkungan pemerintah, penyerahan kewenangan dari manajemen puncak kepada para manajer level lebih rendah dimaksudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. Dalam pelaksanaannya pemerintah mempunyai 2 jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban vertical kepada pusat, dan pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua hal tersebut merupakan hal yang penting dalam proses akuntabilitas. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga – lembaga publik baik di pusat maupun di daerah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah publik baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintah untuk menciptakan *Good Governance*.

*Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip karakteristik

tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. (Mardiasmo ( 2004 : 25 )

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah selain *good governance* adalah pengendalian intern. Pengendalian Intern merupakan kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha & Frederick 2011:8).

Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2005 Pemerintah menetapkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.” Pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemda maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun bentuk auditnya adalah audit keuangan. Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas

laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemda yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.” Tujuan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.

Informasi tentang kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan selama ini sudah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan atau belum. Untuk menilai kinerja maka diperlukan berbagai indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas, tanpa indikator atau kriteria yang jelas maka tidak akan bisa digunakan sebagai alat pengukuran kinerja yang memadai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nur Azlina, Ira Amelia (2014) tentang pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Azlina, Ira Amelia (2014) terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Nur Azlina, Ira Amelia (2014) adalah Kabupaten Pelalawan sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian SKPD Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alasan pemilihan daerah Kabupaten Gunungkidul dijadikan tempat penelitian adalah karena Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang berada jauh dari pemerintah pusat, jauh dari pengawasan langsung pemerintah pusat. Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah tujuan wisata maka dari itu Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten yang mempunyai potensi kemajuan yang tinggi dibanding dengan kabupaten lain, kabupaten yang tidak bisa di pandang sebelah mata yang menjadi sorotan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Gunungkidul “**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini maka penulis membuat suatu perumusan masalah terlebih dahulu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah

- a. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Gunungkidul ?
- b. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah di SKDP Kabupaten Gunungkidul ?
- c. Apakah *Good Governance* dan Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Gunungkidul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Gunungkidul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Bagi masyarakat luas terdapat dua aspek manfaat :

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Aspek Praktis

Manfaat yang diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah.

**E. Batasan Masalah**

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh antara *Good Governance* dan Pengendalian Intern di SKPD Kabupaten Gunungkidul.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Good Governance

##### 1.1 Governance

*Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintah mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan – perbedaan diantara mereka Arja Sadjiarto (2000).

Definisi lain menyebutkan *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Winarno, 2002:122).

## 1.2 Good Governance

*Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Munculnya konsep *Good Governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan stakeholder-nya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Trisnaningsih, 2007).

Dalam Kamus bahasa Indonesia *good governance* diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik, namun ada yang menerjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di samping itu, arti yang lain *good governance* sebagai pemerintahan yang amanah. Jika *good governance* diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil,

transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan (Effendi dalam Azhari, dkk., 2002: 187).

Definisi *good governance* menurut ahli dan institusi negara, yakni antara lain :

1. **Kooiman (1993)** bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.
2. **World Bank (dalam Mardiasmo, 2002 : 23)**, ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
3. **United Nations Development Program (UNDP)** dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*”, (1997), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan

merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. *United Nations Development Program* (UNDP) juga mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan *society*.

4. **Lembaga Administrasi Negara (Kurniawan, 2005)**, mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000**, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut : “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

*Good governance* dilaksanakan agar kinerja pemerintahan daerah lebih terarah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang memadai guna mencapai hasil yang lebih baik dan terciptanya struktur pemerintahan yang ideal yang berorientasi pada tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, *good governance* berorientasi pada :

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

**Lembaga Administrasi Negara (2000)** menyimpulkan bahwa wujud *good governance* penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sehingga unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Pemerintahan (negara)

Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan

perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

### 3. Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah, mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi

#### 1.3 Prinsip *Good Governance*

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan LSM/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan dan terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik yakni “proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.

Menurut **Bhatta (1996)** mengungkapkan pula bahwa unsur utama *governance*, yaitu: akuntabilitas (*accountability*), transparan (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). **UNDP (dalam Mardiasmo, 2002)** mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip pada pelaksanaan *good governance* meliputi :

1. Partisipasi (*participation*), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan hukum (*rule of law*), kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan dan dilaksanakan secara utuh, terutama tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (*transparency*), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya tanggap (*responsiveness*), setiap institusi/lembaga-lembaga publik dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

5. Berorientasi konsensus (*Consensus orientation*), Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Keadilan (*equity*), setiap masyarakat memiliki kesempatan sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia serta pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Akuntabilitas (*accountability*), para pengambil keputusan dalam organisasi publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan.
9. Visi strategis (*strategic vision*), penyelenggara pemerintahan yang baik dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke

depan agar bersamaan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat empat prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. *Akuntabilitas*, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. *Transparansi*, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. *Keterbukaan*, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. *Aturan hukum*, pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

**Robert Hass (dalam Sedarmayanti, 2000)** juga memberi indikator tentang “*good governance*” yang meliputi lima indikator, antara lain :Melaksanakan hak asasi manusia, Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, Mengembangkan ekonomi pasar atas

dasar tanggung jawab kepada masyarakat, Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan. Indikator *good governance* yang disampaikan oleh Robert Hass di atas sangatlah ringkas dan padat, namun berorientasi pada tiga elemen pemerintahan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan *good governance*, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut pendapat Ganie Rochman, *good governance* memiliki empat unsur utama, yang meliputi *accountability*, *rule of law*, informasi dan transparansi (Sadjiono, 2005:195).

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai amanat konstitusi, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Di samping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kurniawan, 2005:16).

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat, dan *stakeholder* yang berkepentingan (sektor swasta, LSM/NGO dan elit politik) demi memajukan pembangunan serta pemerintahan

daerah yang berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, makawujud *good governance* adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang solid, kondusif dan bertanggung jawab dengan menjaga kesinergisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berkesinambungan, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

## **2. Pengendalian Intern**

Pengendalian internal merupakan semua elemen dari sebuah organisasi yang diambil bersama - sama dalam mencapai tujuan organisasi, atau tindakan yang dapat meningkatkan kemungkinan mencapaim tujuan perusahaan. "alam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya atau aset. Dijelaskan bahwa manajemen harus melakukan proses Audit Pengendalian internal, tujuannya untuk memastikan apakah bawahannya telah

melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur sehingga terhindar dari kemungkinan adanya kecurangan.

Perusahaan menggunakan pengendalian intern untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan sistem. Pimpinan perusahaan menyadari pentingnya manajemen yang didalamnya mengatur tentang pengendalian intern sebagai alat berharga dalam menunaikan tanggung jawabnya.

Mulyadi (2002:181) menyatakan bahwa :

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijadikan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut :

- a. Keandalan pelaporan keuangan.
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Tunggal menyatakan bahwa :

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director, manajemen dan personil yang lain, yang didesain untuk mendapatkan keyakinan memadai (Reliability assurance) tentang pencapaian dalam hal-hal berikut :

- a. Kesudahan laporan keuangan (Reliability of financial reporting)
- b. Kesesuaian dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Compliance with applicable laws and regulations).
- c. Efektivitas dan efisien operasi.

Mulyadi menyatakan bahwa:

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian yang keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang dikutip oleh Bambang Hartadi (1987) menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern.

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern :

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
5. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

## 2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : kendalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Menurut Mulyadi tujuan pengendalian intern akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kekayaan perusahaan
  1. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan
  2. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi :
  1. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang ditetapkan.
  2. Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi.

Tujuan tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan :
  1. Pembatasan akses langsung terhadap karyawan.
  2. Pembatasan akses tidak langsung terhadap karyawan.

- b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada:
  - 1) Perbandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya ada
  - 2) Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan
- c. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan:
  - 1) Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang
  - 2) Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
- d. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi:
  - 1) Pencatatan semua transaksi yang terjadi
  - 2) Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi
  - 3) Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar
  - 4) Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya
  - 5) Transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya
  - 6) Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti

## **2.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas

- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya Sistem pengendalian intern yang memadai bagi perusahaan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, tergantung dari sifat serta keadaan masing-masing perusahaan. Dalam artian tidak ada sistem pengendalian intern yang bersifat universal yang dapat dipakai oleh seluruh perusahaan.

### 2.3 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

- a. Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

- b. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang.

- c. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem

pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

d. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

e. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

f. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

#### 2.4 Komponen-Komponen Pengendalian Intern

Komponen Pengendalian Intern menurut COSO adalah :

- a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*). Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung

jawab serta mengorganisasi dan mengembangkan orangnya, perhatian pengarah yang diberikan oleh board.

- b. Penaksiran Resiko(*risk assessment*). Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi menganalisis dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dimana organisasi beroperasi
- c. Aktivitas Pengendalian(*control activities*). Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai, umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. :

1. Pengendalian Pemrosesan Informasi
  - pengendalian umum
  - pengendalian aplikasi
  - otorisasi yang tepat
  - pencatatan dan dokumentasi
  - pemeriksaan independen
2. Pemisahan tugas
3. Pengendalian fisik
4. Telaah kinerja

- d. Informasi dan Komunikasi (*Information dan communication*). Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
- e. Pemantauan (*Monitoring*). Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya

### 3. Kinerja

#### 3.1 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003,223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003,223-224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Simamora (1997) mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah tingkatan dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sedangkan Suprihanto (dalam Srimulyo,1999 : 33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kinerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan

kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Kinerja mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan perusahaan. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam Moh As'ad, 2003) sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah "succesfull role achievement" yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (Moh As'ad, 2003).

Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006).

Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Kinerja

merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang telah ditentukan (Masrukhin dan Waridin, 2004).

### 3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001 : 82) faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

1. Kemampuan mereka
2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
5. Hubungan mereka dengan organisasi.

Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain :

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara

maksimal. Gibson (1987) mengemukakan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja :

- 1) Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
- 2) Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja
- 3) Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system)

### **3.3 Unsur-Unsur Penilaian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dinyatakan bahwa unsur – nilai kinerja yang dinilai adalah : kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan bagi yang menjabat sebagai pemimpin.

- 1) Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 2) Prestasi Kerja adalah bagaimana kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaannya, apakah pegawai mempunyai kecakapan, keterampilan, dan kesungguhan dalam bekerja, juga dilihat dari hasil pelaksanaan pekerjaan yang dicapai oleh

seorang pegawai yang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

- 3) Tanggung Jawab adalah kesanggupan pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau dilakukan.
- 4) Ketaatan adalah sikap pegawai terhadap peraturan dan ketentuan yang ada yang telah disepakati di tempat pegawai bekerja.
- 5) Kejujuran adalah sikap pegawai yang tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, serta selalu membuat laporan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 6) Kerjasama adalah kemampuan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas bersama dengan orang lain.
- 7) Prakarsa adalah suatu kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan atau tindakan, tanpa harus selalu menunggu prunjuk dari atasan serta kemampuan pegawai dalam mencari tata kerja baru yang akan mengeluarkan hasil yang lebih baik, juga bagaimana kemampuan pegawai dalam memberikan saran dan masukan kepada atasannya.
- 8) Kepemimpinan adalah kemampuan pegawai dalam penguasaan tugas, mengambil keputusan, berkomunikasi, menentukan

prioritas, ketegasan dan obyektifitas, sebagai panutan, koordinasi serta memahami kemampuan bawahan.

#### 4. Penelitian Terdahulu

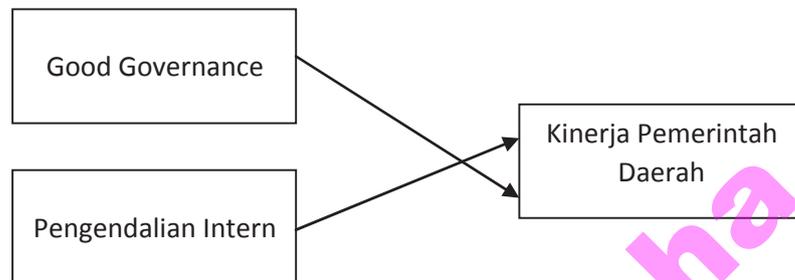
Banyak penelitian yang terkait dengan *Good Governance*, Pengendalian Intern dan juga Kinerja yang sudah dilakukan antara lain sebagai berikut :

Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelelawan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah.

Yessi Amanda (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap informasi kinerja keuangan yang mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *good Governance* dengan informasi kinerja.

Nova Andriyanto (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja manajerial, yang hasilnya *Good Governance* dan Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

## 5. Model Penelitian



## 6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dari penelitian ini adalah :

Ha<sub>1</sub> : *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Ha<sub>2</sub> : Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Ha<sub>3</sub> : *Good Governance* dan Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Bentuk Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian korelasional dengan analisa kuantitatif dengan tujuan mencari pengaruh antara variabel independent dan variabel dependent. Dengan ini diharapkan dapat memberikan informasi sesuai data yang diperoleh.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada SKPD Kabupaten Gunungkidul.

#### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Gunungkidul, responden yang pada penelitian ini adalah aparat pemerintah yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berupa kuisioner. Data diperoleh langsung dari responden aparat Pemerintah di SKPD di Kabupaten Gunungkidul.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi secara langsung ke SKPD Kabupaten

Gunungkidul dan memberikan kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan yang terstruktur yang ditunjukkan kepada responden, yang nantinya responden akan memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan opininya.

## 6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nasir, 1999 : 152). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sehubungan permasalahan adalah :

### a. *Good Governance*

*Good Governance* adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha / berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik,

Variabel *Governance* diukur dengan menggunakan 4 indikator variabel yaitu dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban. Pertanyaannya diukur dengan menggunakan 5 skala likert, dimana yang dimulai dari skala 1 “ sangat tidak setuju “ sampai skala 5 yang menunjukkan “ sangat setuju “.

#### b. Pengendalian Intern

Berdasarkan dengan komponen-komponen atau unsur pokok pengendalian intern, COSO dalam messier (2000 : 188), mengatakan bahwa pengendalian intern terdapat 5 komponen yaitu

- 1) Lingkungan Pengendalian.
- 2) Penaksiran resiko
- 3) Aktifitas Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan.

Pengendalian intern diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Prasetyono (2007). Instrument tersebut terdiri dari pertanyaan mengenai informasi yang berhubungan dengan pengendalian intern, dengan skala likert 5 yang dimulai dari skala 1 “ sangat tidak setuju “ sampai skala 5 yang menunjukkan “ sangat setuju “.

#### c. Kinerja Pemerintah

Kinerja Pemerintah dinilai dari pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja rutin, dan belanja pembangunan yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2001) dan kuesioner telah disesuaikan dengan sistem penganggaran di Indonesia. Pertanyaan diukur dengan skala likert 5 yang dimulai dari skala 1 “ sangat tidak setuju “ sampai skala 5 yang menunjukkan “ sangat setuju “.

## **7. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang diadopsi dari Penelitian Depi Oktia Ruspina (2013) yang di modifikasi dengan mengurangi 1 variabel yang tidak ada dalam penelitian ini.

## **8. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan proses pengujian data yang meliputi pemilihan , pengumpulan, dan analisis data. Oleh karena itu hasil kesimpulan ini berdasarkan kualitas data dan variabel yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian .

## **9. Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik**

Dalam penelitian ini uji kualitas data yang dilakukan adalah uji validitas dan reabilitas. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi (Wijaya , 2012). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konskuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tidak bisa dipenuhi.

## **10. Analisis Regresi Berganda**

Analisis tegresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (*good governance* dan pengendalian intern)

terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah Daerah). Adapun bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

a = Konstanta

$b_1b_2$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Good Governance

$X_2$  = Pengendalian Intern

e = galat (*error terms*)

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibukota di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mempunyai luas wilayah sebesar 1.485,36 km<sup>2</sup> mempunyai 18 kecamatan dan 144 desa, letak kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudera Hindia disebelah selatan, sedangkan bagian timur berbatasan langsung dengan kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah), dan batas wilayah bagian utara berbatasan langsung dengan kabupaten klaten dan sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah), sedangkan untuk bagian barat langsung berbatasan dengan kabupaten Bantul dan Sleman (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ( $\pm 90\%$ ) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa. Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km

dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 tanggal 15 Maret 2010 maka telah ditetapkan visi Kabupaten Gunungkidul yaitu “Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2025” dan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka kabupaten Gunungkidul mempunyai 6 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
2. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian.
4. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah.
5. Mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai, dan
6. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

#### B. Pengembalian Kuesioner

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, kuesioner diantar dan dijemput langsung pada responden, adapun lama penyebaran kuesioner sampai dengan kuesioner kembali lagi adalah 2 minggu dari tanggal

mengantar tanggal 02 Februari 2016 sampai 17 Februari 2016. Jumlah kuesioner yang disebar di SKPD Kabupaten Gunungkidul sebanyak 30 lembar mengambil sampel dari kepala bagian masing – masing bagian di SKPD Kabupaten Gunungkidul, dari jumlah kuesioner yang disebar tingkat pengembalian kuesioner adalah 100%.

### C. Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Karakteristik dari data responden dapat digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Gambaran karakteristik dari responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	9	30,0
2	Laki – Laki	21	70,0
	Total	30	100,0

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah Laki - laki dengan jumlah 21 orang atau dengan presentase 70,0% sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang atau dengan pesentase sebesar 30,0.

Sedangkan untuk melihat statistik umur dari responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2 Usia Responden**

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	Dibawah 30 tahun	2	6,7
2	Antara 30 sampai dengan 40 tahun	9	30,0
3	Diatas 40 tahun	19	63,3
Total		30	100

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar umur responden adalah diatas 40 tahun sebanyak 19 orang atau sebanyak 63,3%, sedangkan untuk umur antara 30 – 40 tahun sebanyak 9 orang atau 30,0% dan untuk umur responden paling sedikit dibawah 30 tahun sebanyak 2 orang atau 6,7 % .

Sedangkan untuk melihat statistik deskriptif pendidikan responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3 Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	1	3,3
2	D1	0	0
3	D3	0	0
4	S1	17	56,7
5	S2	12	40,0
Total		7	100

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berpendidikan S1 yaitu sebanyak 17 orang atau sebanyak 56,7 %, sedangkan untuk pendidikan S2 sebanyak 12 responden atau sebanyak

40,0 % dan sedangkan untuk pendidikan SLTA terdapat 1 responden atau 3,3 % dan untuk pendidikan D1 dan D3 tidak ada.

## 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif variabel penelitian berguna untuk mendukung hasil analisis data yang menyajikan distribusi hasil jawaban responden atas pertanyaan – pertanyaan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Governance*, Pengendalian Intern, dan Kinerja Pemerintah. Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk masing – masing variabel dalam penelitian ini.

**Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

		Statistics		
		Good Governance	Pengendalian Intern	Kinerja Pemerintah Daerah
N	Valid	30	30	30
	Missing	0	0	0
Mean		49,7667	91,4000	43,5333
Median		49,0000	91,0000	44,0000
Mode		46,00	90,00	44,00
Std. Deviation		4,26439	6,70872	2,37419
Variance		18,185	45,007	5,637
Range		15,00	27,00	9,00
Minimum		44,00	76,00	39,00
Maximum		59,00	103,00	48,00
Sum		1493,00	2742,00	1306,00

Apabila penilaian terhadap responden pada masing – masing item dikategorikan dalam bentuk skor tertinggi dan terendah, adapun formulasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \text{Panjang kelas}$$

Hasil pengkategorian untuk analisis frekuensi dari masing – masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Indikator Good Governance terdiri dari 13 pertanyaan

$$\text{Skor Tertinggi} : 13 \times 5 = 65$$

$$\text{Skor Terendah} : 13 \times 1 = 13$$

$$\text{Panjang Kelas} : \frac{65 - 13}{5} = 10,4$$

$$\text{Skor } 13 - 23,4 = \text{masuk kategori STS}$$

$$\text{Skor } 23,5 - 33,8 = \text{masuk kategori TS}$$

$$\text{Skor } 33,9 - 44,2 = \text{masuk kategori Ragu - Ragu}$$

$$\text{Skor } 44,3 - 54,6 = \text{masuk kategori S}$$

$$\text{Skor } 54,6 - 65 = \text{masuk kategori SS}$$

2. Indikator Pengendalian Intern terdiri dari 22 pertanyaan

$$\text{Skor Tertinggi} : 22 \times 5 = 110$$

$$\text{Skor Terendah} : 22 \times 1 = 22$$

$$\text{Panjang Kelas} : \frac{110 - 22}{5} = 17,6$$

$$\text{Skor } 22 - 39,6 = \text{masuk kategori STS}$$

$$\text{Skor } 39,7 - 57,2 = \text{masuk kategori TS}$$

$$\text{Skor } 57,3 - 74,8 = \text{masuk kategori Ragu - Ragu}$$

$$\text{Skor } 74,9 - 92,4 = \text{masuk kategori S}$$

$$\text{Skor } 92,5 - 110 = \text{masuk kategori SS}$$

3. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari 10 pertanyaan

$$\text{Skor Tertinggi} : 10 \times 5 = 50$$

$$\text{Skor Terendah} : 10 \times 1 = 10$$

$$\text{Panjang Kelas} : \frac{50 - 10}{5} = 8$$

Skor 10 – 18 = masuk kategori STS

Skor 18,1 - 26 = masuk kategori TS

Skor 26,1 – 34 = masuk kategori Ragu – Ragu

Skor 34,1 - 42 = masuk kategori S

Skor 42,1 - 50 = masuk kategori SS

Dari table 4.4 dapat dilihat dan dijelaskan bahwa variabel Good Governance mempunyai skor nilai minimum sebesar 44 dan skor nilai maximum sebesar 59, Jadi total skor jawaban terendah responden dari indikator yang pertama Good Governance adalah sebesar 44 sedangkan total skor tertinggi jawaban responden untuk variabel Good Governance adalah 59, dengan nilai rata – rata skor jawaban responden sebesar 49,7667, dan berdasar dari kategori penilaian variabel Good Governance berada pada rentan skor 44,3 – 54,6 atau bisa dikatakan setuju. Jadi pada indikator pertanyaan variabel Good Governance rata – rata responden menjawab setuju sehingga dinyatakan bahwa penerapan Good Governance telah dilaksanakan dengan Baik di SKPD Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan table 4.4 dapat dilihat dan dijelaskan bahwa variabel Pengendalian Intern mempunyai skor minimum sebesar 76 dan skor maximum sebesar 103, Jadi total skor jawaban terendah responden dari indikator pertama Pengendalian Intern 76, sedangkan total skor tertinggi jawaban responden

untuk variabel Pengendalian Intern adalah sebesar 76, dengan nilai rata – rata skor jawaban responden sebesar 91,4000 , dan berdasarkan dari kategori penilaian variabel Pengendalian Intern berapa pada rentan skor 74,9 – 92,4 atau bisa dikatakan setuju. Jadi pada indikator pertanyaan variabel Pengendalian Intern rata – rata responden menjawab setuju sehingga dinyatakan bahwa penerapan Pengendalian Intern telah dilaksanakan dengan Baik di SKPD Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan table 4.4 dapat dilihat dan dijelaskan bahwa variabel Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai skor minimum sebesar 39 dan skor maximum sebesar 48, Jadi total skor jawaban terendah responden dari indikator pertanyaan Kinerja Pemerintah Daerah 39, sedangkan total skor tertinggi jawaban responden untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 48, dengan nilai rata – rata skor jawaban responden sebesar 43,5333 , dan berdasarkan dari kategori penilaian variabel Kinerja Pemerintah Daerah berapa pada rentan skor 42,1 - 50 atau bisa dikatakan sangat setuju. Jadi pada indikator pertanyaan variabel Kinerja Pemerintah Daerah rata – rata responden menjawab setuju sehingga dinyatakan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan Baik di SKPD Kabupaten Gunungkidul.

#### D. Hasil Pengujian Kualitas Data

##### a) Validitas dan Realibilitas

Pada penelitian kali ini tidak dilakukan Uji Validitas dan Reliabilitas karena instrument yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu

berupa kuesioner yang didapat dari hasil adopsi, sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas dan realibilitas kembali.

#### E. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

##### a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji kenormalan dari pendistribusian data yang digunakan sudah normal atau belum.

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*, dalam *Kolmogorov-Smirnov Test* ini taraf signifikan data dianggap normal sebesar 0,05 atau 5%. Jika signifikan > 0,05 maka data distribusi datanya dianggap normal, sedangkan jika signifikan < 0,05 maka dianggap data tidak terdistribusikan secara normal.

**Tabel 4.5 Uji Normalitas**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Good Governance	,112	30	,200*	,937	30	,077
Pengendalian Intern	,127	30	,200*	,972	30	,605
Kinerja Pemerintah Daerah	,111	30	,200*	,969	30	,505

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Dari table diatas maka bisa dilihat dan dijelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan *Kolmogorov-Smirnov Test* hasil nilai signifikannya sebesar 0,200. Dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusikan dengan normal karena nilai signifikan dari uji normalitas adalah > 0,05.

b) Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	18.838	4.104		4.590	.000		
	Good Governance (X1)	.260	.096	.467	2.705	.012	.512	1.955
	Pengendalian Intern (X2)	.129	.061	.363	2.101	.045	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Model regresi bisa dikatakan baik atau tidaknya dengan melakukan Uji multikolinieritas, uji tersebut bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel independent, dan model regresi dikatakan baik apabila tidak ditemukan adanya korelasi diantara variabel independent.

Untuk melakukan uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai dari *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing- masing variabel independent. Suatu model bisa dikatakan baik apabila nilai *tolerance value* diatas 0,10 dan  $VIF < 10$ .

Dan dari hasil yang bisa kita lihat dari tabel nilai *tolerance value* berada diatas 0,10 dan nilai  $VIF < 10$  maka model regresi tersebut variabel bebasnya tidak saling berkorelasi, atau bisa dikatakan baik

c) Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas**

			Correlations		
			Good Governance (X1)	Pengendalian Intern (X2)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Good Governance (X1)	Correlation Coefficient	1.000	.654**	.194
		Sig. (2-tailed)	.303	.000	.303
		N	30	30	30
	Pengendalian Intern (X2)	Correlation Coefficient	.654**	1.000	.132
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.488
		N	30	30	30
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.194	.132	1.000
		Sig. (2-tailed)	.303	.488	.
		N	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa korelasi variabel *good governance* sebesar 0,194 dan variabel pengendalian intern sebesar 0,132 dengan nilai signifikansi kedua variabel diatas 0,05 yaitu masing – masing signifikansi untuk variabel *good governance* 0,303 dan variabel pengendalian intern nilai signifikansinya 0,488, maka dapat disimpulkan jika pada persamaan ini tidak terjadi heteroskedasitas.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen ( *Good Governance* dan Pengendalian Intern ) terhadap

variabel dependen ( Kinerja Pemerintah Daerah ). Besarnya pengaruh pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig
Konstanta	18,838	4,590	2,045	0,000
Good Governance	0,260	2,705	2,045	0,012
Pengendalian Intern	0,129	2,101	2,042	0,045
		R		= 0,766
		Adjusted R Square		= 0,557
		Standar error		= 1,58031
		Fhitung		= 19,228
		Fsig		= 0,000

Dari tabel 4.9 dapat dilihat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 18,838 + 0,260X_1 + 0,129X_2 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta sebesar 18,838 menunjukkan bahwa besarnya tingkat kinerja pemerintah daerah pada saat terjadi *good governance* dan pengendalian intern adalah sebesar 0.
- b) Koefisien regresi variabel *good governance* menunjukkan angka 0,260, dengan asumsi variabel pengendalian intern konstan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan meningkatkan variabel *good governance* akan meningkatkan nilai kinerja pemerintah kabupaten, dengan besaran kenaikan dalam satu kesatuan yaitu sebesar 0,260.
- c) Koefisien regresi variabel pengendalian intern menunjukkan angka 0,129, dengan asumsi variabel *good governance* konstan maka dapat diambil

kesimpulan bahwa dengan meningkatkan variabel pengendalian intern maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dengan besaran kenaikan dalam satu satuan yaitu sebesar 0,129.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis uji regresi dapat dilihat pada tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa besarnya adjusted R Square sebesar 0,557 berarti 55,7% perubahan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel *good governance* dan pengendalian intern. Sedangkan untuk 44,3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan regresi ini.

## 2. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dapat secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil persamaan regresi dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  yaitu sebesar 19,228 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,000 > 0,05$  dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

## 3. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hubungan yang signifikan dari masing – masing variabel atau dengan kata lain untuk mengetahui adanya pengaruh variabel *good governance* ( $X_1$ ) dan pengendalian intern ( $X_2$ ) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).

- a. *Good Governance* ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).

Pengujian untuk hipotesis 1 dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan dengan nilai  $sig < \alpha 0,05$ . Dari persamaan menunjukkan bahwa  $2,705 > 2,045$  dengan nilai  $sig 0,012 < \alpha 0,05$  dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Dengan ini maka Hipotesis 1 diterima.

- b. Pengendalian Intern ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).

Pengujian untuk hipotesis 2 dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan dengan nilai  $sig < \alpha 0,05$ . Dari persamaan menunjukkan bahwa  $2,101 > 2,045$  dengan nilai  $sig 0,0045 < \alpha 0,05$  dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Dengan ini maka Hipotesis 2 diterima

- c. *Good Governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

**Tabel 4.9 Tabel Pengaruh Varibel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y**

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.766 <sup>a</sup>	.588	.557	1.58031	.588	19.228	2	27	.000

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern (X2), Good Governance (X1)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variabel *good governance* ( $X_1$ ) dan pengendalian intern ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) dan besar pengaruhnya sebesar 55,7 % dapat diartikan bahwa ada variabel lain sebesar 44,3 % yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Y) selain variabel *good governance* ( $X_1$ ) dan pengendalian intern ( $X_2$ ). Jadi hipotesis 3 diterima.

#### G. Pembahasan Penelitian

##### a. Pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari data tabel 4.8 penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara *good governance* dengan kinerja pemerintah daerah, hal ini di dapat dari hasil perhitungan  $t_{hitung}$  pada variabel *good governance* lebih besar daripada  $t_{tabel}$  yaitu sebesar  $2,705 > 2,045$  dan dengan nilai  $sig\ 0,012 < \alpha\ 0,05$ , dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 diterima, hal ini berarti semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk melihat apakah ada pengaruh dari *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dan hal ini juga telah memberikan informasi bahwa dengan penerapan *good governance* yang baik maka akan meningkatkan kinerja pemerinah daerah kabupaten Gunungkidul, dengan adanya pemerintahan yang terbuka (*transparancy*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas

(*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*) maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

*Good Governance* jika di terapkan dengan baik akan menciptakan hasil yang baik, dan akan memberikan peningkatan terhadap kinerja baik di sektor swasta maupun untuk sektor publik di pemerintahan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa publik seharusnya amanah, tanggung jawab yang berarti harus menerapkan prinsip *good governance* dengan baik agar mampu meningkatkan hasil kerja atau meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) yang menyatakan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan juga mendukung penelitian Yessi (2014) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

b. Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari data tabel 4.8 penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pengendalian intern dengan kinerja pemerintah daerah, hal ini di dapat dari hasil perhitungan  $t_{hitung}$  pada variabel pengendalian intern lebih besar daripada  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 2,101 > 2,045 dengan nilai sig 0,0045 <  $\alpha$  0,05, dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima, hal ini berarti semakin baik pengendalian intern maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Pengendalian intern memang sangat diperlukan karena fungsi dari pengendalian intern ini sendiri juga sebagai pencegah adanya kecurangan (*fraud*) dalam organisasi tersebut, jadi jika semakin baik suatu pengendalian intern maka akan semakin baik pula kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Nova (2013) bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial PT BRI.

- c. Pengaruh *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil pengujian Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan dari hasil perhitungan tabel 4.9 maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan besaran pengaruh sebesar 55,7% yang berarti bahwa terdapat 44,3% variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selain dari variabel yang dipakai dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini berarti menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan penerapan *good governance* dan pengendalian intern dapat meningkatkan juga kinerja pemerintah daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah, maka dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Good Governance* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, semakin baik penerapan *good governance* maka akan meningkatkan juga kinerja pemerintah daerah, dengan adanya pemerintahan yang terbuka (*transparancy*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*) maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Pengendalian intern mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, semakin baik pengendalian intern maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah, pengendalian intern sangat diperlukan karena fungsi dari pengendalian intern ini sendiri juga sebagai pencegah adanya kecurangan (*fraud*) dalam organisasi tersebut.
3. *Good Governance* dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar 55,7% sedangkan ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sebesar 44,3%

## B. Keterbatasan

Didalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan untuk menjadi sempurna, oleh karena itu keterbatasan yang perlu diperhatikan pada penelitian – penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Adanya responden yang menjawab dengan tidak serius sehingga menjadikan hasil tidak sesuai dengan kenyataan.
2. Variabel yang digunakan hanya *good governance* dan pengendalian intern, dan dari hasil perhitungan Adjusted R Square sebesar 55,4% maka dapat ditarik kesimpulan ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang nantinya bisa untuk bahan variabel penelitian selanjutnya.
3. Tidak mencakup semua SKPD di kabupaten Gunungkidul.

## C. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah variabel yang diteliti misalnya komitmen, motivasi dan gaya kepemimpinan.
2. Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan responden yang lebih besar yaitu semua SKPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Mangkunegara, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik* . Yogyakarta : Pembaharuan
- Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Andriyanto, Nova 2013, *Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Manajerial*
- As'ad, Moh, 2003. *Psikologi Industri : Seri Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Liberty
- Bhatta, Ghambir. 1996. *Capacity Building at the Local Level for Effective Governance*, Empowerment without capacity is Meaningless.
- Gibson, dkk. 1987. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kelima, Jilid 1, Alih Bahasa Djarkasih, Erlangga, Jakarta
- Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja*. *JRBI* . Vol 2. No 2. Hal 165-180
- Hakim, Abdul. 2006. *Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah* . *JRBI*. Vol 2. No 2. Hal : 165 - 180

- Hartadi, Bambang. 1987. *Auditing : Suatu Pedoman pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan*. Edisi Revisi. Jakarta Salemba Empat
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik ed.1*. Yogyakarta. Badan Penerbit FE UGM
- Kooiman, J., (ed) 1993, *Modern Governance: New Government - Society Interactions*, London : Sage Publication
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marthis, Robert L dan Jackson, John H. 2002. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat
- Masrukhin dan Waridin. 2004. *Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai*. EKOBIS. Vol. 7, No 2 Hal: 197-209
- Muhammad, Nasir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mulyadi, 2002. *Auditing*, Buku Dua Edisi ke Enam, Salemba Empat Jakarta
- Mulyawan, Budi 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Organisasi*. Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Nur Azlina & Ira Amelia . 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Kabupaten Pelalawan. *Pekbis Jurnal*, 12 No. 2 Des 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 101 Tahun 2000.
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. *Performance Appraisal : Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Grafindo. Jakarta

Sadjiarto, Arja. 2000, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.

*Jurnal Akuntansi & Keuangan* .Vol.2:135-150

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* ,

Yogyakarta : laksbang Mediatama

Sari, Yessi, Amanda 2009, *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap*

*Organisasi*. Skripsi Universitas Widyatama Bandung

Simamora, Henry, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit STIE

YKPN, Yogyakarta

Srimulyo, Koko, 1999. *Analisis Pengaruh Faktor – Faktor yang mempengaruhi*

*Kinerja Perpustakaan di Kotamadya Surabaya*, Tesis, PPS-Universitas

Aerlangga, Surabaya

Tika, P. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi

Aksara.Jakarta.

Trisnaningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai*

*Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Corporate Governance, Gaya*

*Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor*, Jawa

Timur: Simposium Nasional Akuntansi X.

Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta

Undang -Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

, Jakarta

Undang -Undang RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Dearah, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal  
Otonomi Daerah, Jakarta

Wijaya, Toni. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20*, Penerbit Cahaya Atma. Jakarta

Yuda, Prima. 2012. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern  
Terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal, Vol.1, No. 40

Yunus, Hadori (2000). *Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik Makalah*,  
Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta

[www.gunungkidulkab.go.id](http://www.gunungkidulkab.go.id)

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat